

INVESTOR DAILY
INDONESIA

Editor In Chief : Primus Dorimulu

President Director : Theo L Sambuaga
Chief Executive Officer : Sachin Gopalan
Editor at Large : John RiadyBERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

TAJUK

Kami Hadir untuk Negeri

Mengusung jurnalisme positif, harian *Investor Daily* hadir di tengah pemadana, 26 Juni 2001, saat ekonomi Indonesia sedang bergerak meninggalkan titik nadir. Tiga tahun sebelumnya, ekonomi diempas krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi menjadi salah satu pemicu runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi.

Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi minus 13,2%, inflasi membengkak hingga 77,6%, suku bunga di atas 50%, dan rupiah bergerak dari Rp 2.500 ke Rp 16.500 per dolar AS. Jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi menyebabkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sempat di atas US\$ 1.100 per kapita anjlok ke US\$ 460 per kapita pada 1998.

Di pasar modal, harga saham meluncur ke bawah. Nilai kapitalisasi pasar saham yang pernah di atas Rp 500 triliun terpecahkan dan tinggal Rp 196 triliun. Saham sebagian besar emiten, termasuk emiten besar, hanya seharga kertas toilet. Ada investor yang sakit keras dan bunuh diri karena penurunan harga saham yang sangat besar.

Puluhan bank ditutup akibat buruknya kinerja, antara lain rasio kecukupan modal yang minus belasan hingga puluhan persen dan *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah yang membengkak hingga di atas 50%. Belasan bank papan atas harus diselamatkan pemerintah lewat bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kebijakan rekapitalisasi perbankan. Puluhan perusahaan besar dan bank diserahkan ke Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BBPN).

Angka pengangguran dan kemiskinan membengkak. Ekonomi Indonesia seperti tak lagi memiliki prospek. Tanpa korporasi besar, UKM tak cukup kuat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam pada itu, perusahaan Indonesia yang berkualitas bagus jatuh ke tangan asing akibat *fire sale* yang dilakukan terburu-buru oleh BPPN.

Pesimisme menghinggapi para

pelaku bisnis, melihat hampir semua perusahaan besar menjadi "pasien" BPPN. Di tengah pesimisme itu, *Investor Daily* hadir sebagai harian ekonomi pagi yang menyajikan berita dan analisis yang membangkitkan harapan pembaca. Indonesia harus memiliki modal besar untuk bertumbuh dan masa depan yang cerah.

Investor Daily hadir dengan mengusung jurnalisme baru, yakni jurnalisme positif. Jurnalisme positif bukan jenis jurnalisme yang mengharamkan berita buruk. Semua fakta mengenai peristiwa dan pendapat yang memiliki nilai berita, baik atau buruk, menjadi pemberitaan. Jurnalisme positif bukan jenis jurnalisme yang melakukan *cover up* atau menutup-nutupi fakta buruk kendati fakta buruk itu sangat menyangkut kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan kemanusiaan.

Jurnalisme positif merupakan pilihan pemberitaan yang lebih mementingkan dampak bagi pembaca. Berita yang disajikan *Investor Daily* harus bisa membantu pembaca mengatasi masalah yang dihadapi sehari-hari, membangkitkan optimisme, dan mewujudkan masyarakat baru yang lebih beradab, adil, dan sejahtera. Fakta buruk yang disajikan selalu disertai solusi dan gambaran masa depan agar pembaca menatap masa depan dengan optimistis. Jurnalisme baru yang dianut *Investor Daily* merebut hati pembaca.

Dari tahun ke tahun, harian ini kian dibutuhkan para pelaku bisnis sebagai santapan pagi. Berawal dari pemberitaan tentang dinamika pasar modal dan pasar uang, *Investor Daily* kemudian berkembang menjadi harian ekonomi yang memfokuskan pemberitaan pada masalah investasi, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Pembaca yang setia mengikuti pemberitaan *Investor Daily* mendapatkan kemampuan untuk tidak tersesat dalam berinvestasi.

Terimakasih kepada seluruh pembaca dan pemasang iklan. Karena Anda kami hadir. Untuk Anda kami ada dan bersama Anda, kami tetap eksis untuk memajukan negeri. ■



Urgensi Revolusi Mental Birokrasi

Oleh Harliantara

► Presiden Joko Widodo sangat prihatin dengan kinerja birokrasi. Hal itu ditunjukkan oleh Presiden ketika melakukan inspeksi ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam inspeksi tersebut Presiden melihat sendiri betapa lambannya waktu *dwelling time* kontainer di pelabuhan tersebut.



■ Harliantara

Melihat ketidakberesan birokrasi pelabuhan, Presiden bertekad untuk menepi pejabat terkait. Langkah tegas Presiden itu sebaiknya juga disertai dengan perubahan mentalitas birokrasi secara menyeluruh di semua lini. *Dwelling time* kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok hanyalah contoh betapa pelayanan birokrasi di Tanah Air memang masih menjadi momok bagi pelayanan publik di Tanah Air. Sejatinya, lambatnya birokrasi dalam melayani publik juga terjadi di eselon lain. Untuk itu perlu penerapan dan pengembangan revolusi mental birokrasi.

Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti itu saat melantik pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXII tahun 2015 di kampus Jatinarong, Sumedang, Jawa Barat, baru-baru ini. Pemerintah bertekad menjadikan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental, khususnya bagi para PNS untuk memperbaiki kepribadian diri, etos kerja, dan kompetensinya. Pengembangan revolusi mental bagi birokrat diharapkan bisa meneguhkan kepribadian bangsa di saat globalisasi merasuk segala lini.

Masyarakat melihat pelaksanaan reformasi birokrasi hanya utopia. Program reformasi birokrasi selama ini masih gagal dan belum

sesuai dengan tuntutan jaman. Hal ini karena reformasi hanya berkutat dengan kenaikan gaji dan remunerasi tapi belum menyentuh hal mendasar, perbaikan kinerja birokrasi secara signifikan dan terukur. Mentalitas feodal birokrat masih bercokol kuat sehingga aspek pelayanan prima kepada rakyat baru sebatas jargon.

Revolusi Mental Birokrasi

Karena itu, sudah sangat tepat jika eksistensi IPDN diproyeksikan sebagai pusat pengembangan revolusi mental. Program pendidikan yang diselenggarakan institusi ini sebaiknya memiliki metode untuk mentransformasikan diri birokrat. Metode tersebut tidak semata berupa doktrin ala militer. Harus dicari metode pengembangan kepribadian yang sesuai dengan kemajuan jaman.

Bagaimanapun pengembangan kepribadian birokrasi akan mewarnai kepribadian nasional. Hal itu bisa dilihat dari negara-negara yang memiliki indeks pelayanan birokrasi yang baik, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. Kepribadian birokrasi di negara-negara tersebut mampu melayani publik secara paripurna dan bisa mengikuti kemajuan teknologi. Buah dari keberhasilan pengembangan kepribadian birokrasi adalah meneguhkan kepribadian nasional yang beimplikasi membaiknya produktivitas nasional dan terwujudnya ketertiban umum.

Dalam domain sosiologi, kepribadian nasional adalah karakteristik yang dimiliki suatu bangsa sebagai perwujudan dari cita-cita, pengalaman sejarah dan budayanya. Nilai-nilai filosofis untuk membangun karakter bangsa dan kepribadian

nasional sangat dibutuhkan dalam era globalisasi sekarang ini. Di Indonesia istilah kepribadian nasional di masa lalu sering dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam manifesto politiknya yang disingkat Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin (Usdek). Semua itu disenyawakan oleh Presiden RI pertama menjadi tajuk Kepribadian Nasional.

Pada saat ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi sedang melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Moratorium tersebut sebaiknya difokuskan untuk program pengembangan mentalitas dan kepribadian PNS.

Revolusi mental bagi birokrasi di Indonesia tidak boleh dilakukan setengah hati. Harus dilakukan revolusi total birokrasi lewat program pengembangan kepribadian diri. Indonesia perlu belajar revolusi birokrasi negara yang telah dilakukan Korea Selatan dan Tiongkok. Korea Selatan menjadi salah satu Macan Asia karena telah melakukan revolusi mental birokrasinya sejak 1980. Proyek nasional itu dipelopori oleh Presiden kelima Chun Doo Wan yang meletakkan sejumlah pilar revolusi birokrasi.

Hal serupa juga dilakukan para pemimpin Tiongkok sejak kepemimpinan Deng Xiaoping. Strategi revolusi birokrasi oleh Deng Xiaoping adalah pengembangan kepribadian dan kompetensi birokrasi secara terpadu serta memangkas birokrasi yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi.

Dalam upaya pengembangan revolusi mental, pemerintahan Jokowi-JK harus tidak segan-segan melakukan sistem pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap PNS yang kepribadiannya sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Hal itu dalam rangka mewujudkan postur birokrasi yang efektif dan bersih dari korupsi. Karena hingga saat ini masih banyak PNS yang berkinerja sangat buruk tetapi masih dengan tangannya menikmati gaji dan remunerasi.

Sinergis dan Komunikatif

Salah satu indikator keberhasilan pengembangan revolusi mental birokrasi adalah tumbuhnya sinergi antarkementerian. Sinergitas kementerian selama ini baru terben-

tuk setelah Presiden marah-marah melihat ketidakberesan dan kelambanan yang terjadi di lapangan. Selain aspek sinergitas, kementerian juga harus memiliki budaya komunikasi yang baik. Hingga kini gaya berkomunikasi kementerian masih terkesan beku dan monoton. Efeknya bisa menimbulkan blunder dan kurang memstimulasi derajat kecerdasan publik. Olah komunikasi, baik komunikasi dengan rakyat, antar lembaga negara, media massa, dan jenis komunikasi lainnya yang menempel pada Kabinet Kerja, harus segera dibenahi agar berbagai program pemerintahan Jokowi-JK bisa dipahami dengan baik.

Dalam hal ini, kita perlu menyebutkan betapa pentingnya juru bicara (jubil) berkualitas di setiap eselon kementerian, badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga negara lainnya. Eksistensi jubil diharapkan dapat menerobos belantara komunikasi yang begitu ruwet dan lamban di lingkungan birokrasi.

Profil jubil kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintahan sebaiknya kompatibel dengan gaya manajemen Presiden Jokowi. Tentu saja, publik berharap agar eksistensi jubil tidak sekadar tukang rias kebijakan. Jubil harus banyak belajar metode dan operasional dari para juru bicara pemerintah Amerika Serikat. Eksistensi dan pranata jubil pemerintah Amerika Serikat sudah ideal. Hubungan kelembagaan, yudisial, dan hubungan timbal balik antara jubil dan media massa Amerika, sudah setara dan mekanismenya pun telah paripurna. Keberadaannya juga telah didukung oleh lembaga *clearinghouse*.

Kita tentu belum bisa langsung sampai ke level yang dimiliki AS. Namun, cepat atau lambat, kita harus mengambil langkah tersebut, dengan sejauh mungkin menghindari *public deceptions* atau kebohongan publik. Dalam hal ini jubil harus cerdas memosisikan dirinya, yakni bagaimana meladeni komunikasi rakyat, dengan tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk pemutarbalikan fakta oleh pihak lain.

Harliantara

Fasilitator Komunikasi John Robert Powers Indonesia, dosen Komunikasi Terapan Fikom Unpad Bandung

POJOK IDE

Mentan: Masyarakat tak tunggu UU, yang penting harga turun
Rakyat hidup di alam nyata, tidak dalam rangkaian pasal-pasal

Sehari, ada 950 ton timah ilegal diekpor dari Babel
Keterlaluhan, pelaku dan jaringannya harus digulung



SURAT PEMBACA

Peduli Nasib Rakyat

SIKAP Presiden Joko Widodo untuk menolak usulan DPR soal dana aspirasi sudah sangat tepat. Ini bukan hanya menyangkut potensinya yang bertabrakan dengan undang-undang, tapi juga menyangkut hal mendasar, yakni kondisi perekonomian bangsa

yang tengah lesu saat ini. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu ini, berbagai pihak mestinya lebih peka terhadap nasib rakyat.

Terpuruknya rupiah serta pertumbuhan ekonomi yang menurun telah membuat rakyat kian menderita. Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK-kan karyawannya karena sudah tidak

mampu lagi memikul beban ongkos produksi. Dampak lanjutannya adalah ancaman pengangguran yang berada di depan mata. Harga barang-barang yang terus melambung juga membuat rakyat semakin terjerembam semakin dalam.

Itulah yang mestinya menjadi perhatian kita semua, tak terkecuali para wakil rakyat di Senayan. Sebagai wakil

rakyat, DPR justru harus menunjukkan kepedulian yang lebih terhadap nasib rakyat yang hidupnya semakin susah. Para wakil rakyat harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, dan memanfaatkan anggaran semaksimal dan seefektif mungkin. Bukan malah memboroskan anggaran.

Sebagai wakil rakyat, para anggota

dewan tak boleh lepas tangan dari berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, pantas lepas tangan. Sangatlah menyakitkan apabila di antara anggota merasa tak perlu memikirkan kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini. Jika begitu, mereka tak pantas menyangand gelar sebagai wakil rakyat, sebab bukan saja tidak berempati dan

bersimpati terhadap penderitaan rakyat, tetapi benar-benar sudah kehilangan kepedulian atas sesama manusia. Ini bukti wakil rakyat kita betul-betul tidak mengenal rakyatnya.

Muslimin

Jl Percetakan Negara II Jakarta Pusat

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGSImpacting Lives Through
News You Can Trust

BERITASATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, Chief Executive Officer: Sachin Gopalan, General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja, Marketing and Communications Director: Sari Kusumaningrum. Groups Editorial Board: Theo L Sambuaga, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Didik J Rachbini, Senior Advisor: Samuel Tahir.

Redaktur Pelaksana: Hari Gunarto, Abdul Aziz, Asisten Redaktur Pelaksana: Ester Nuky URS, Nurjoni

Redaktur: Alex Dungal, Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Fransiscus Rio Winto, Harso Kurniawan, Iwan Subarkah, Jauhari Mahardhika, Nasori, Rizagana, Totok Subagyo, Thomas E. Harefa, Tri Murti, Tri Listiyarini, Yashinto Sembiring, U.Heri Gagarin (Foto), Asisten Redaktur: Aris Cahyadi, Eko Adityo Nugroho, Ely Rahmawaty, Eva Fitriani, Happy Amanda Amalia, Imam Suhartadi, Kunradus Aliandu, Mardiana Makmun, Ovi Oktaviany, Pamudji Slamet, Parluhutan Situmorang, Retno Ayueningtyas, Wahyu Sudoyo. Staf Redaksi: Agustiyanti, Antonia Timmerman, Damiana Simanjuntak, Emanuel Kure, Farid Nurfariz Firdaus, Gita Rossiana, Imam Muzakir, Indah Handayani, Laila Ramdhini, Leonard AL Cahyoputra, Muhammad Edy Sofyan, Muhammad Rausyan Fikry, Novy Lumanauw, Rahajeng Kusuma Hastuti, Ridho Syukra. Wartawan Foto: David Gita Roza, Emral Firdiansyah. Riset Foto: Arief Hidayat. Surabaya: Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi: Chandra Wijayanti (Kepala), Fransiscus Chrisnanto Nugroho, Litbang: Alam Surawijaya. Produksi: Gianto (Kepala), Slamet Riyadi (Wakil), Mochamad Shiddiq, Irwan, Soemadi, Sukadi. Korektor Bahasa: Irfan Saputra. Desain Grafis: Bimo Ario Tejo, Rochadi Kusmabrata. Karikatur: Wisnu Prayitno.

Iklan: M Nadjib Usman (General Manager), Kurniawan Aryanto (Manajer Display), Inne Kuntjaraningrum (Manajer Iklan), Reyhan Korompis (Manajer Iklan Keterbukaan), Enny Wulandari, Sindhu Prasetyo, Charis Herwindrajaya, Arlan Darmawan, Bobby Gusman, Hery Suhaery, Indra Surya Ibrahim, Promosi: Enot Indanoto (Kepala Divisi), Sirkulasi: Dahlan Hutabarat (General Manager), Ayi Junaedi, Andi Yuniarto, Sulastri (Surabaya), Penjualan: Denie Karwur (Manajer), Distribusi: Bambang Hermansyah (Manajer). Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950. Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semangi, Tower A, Lantai 1, Jl. Garnisun Dalam No. 8, Karet, Semangi, Telp. (021) 2995 7500, 2995 7555 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 40.000/mmk, FC Rp 53.000/mmk, Prospektus, Lp. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 18.000/mmk, FC Rp 28.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 10%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: IMWP. Isi di luar tanggung jawab percontakan.